

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan banyaknya pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk arus kargo masuk dan keluar, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka perdagangan internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 mendefinisikan perdagangan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan pertukaran komoditas dan/atau jasa baik di dalam maupun di luar batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan kepemilikan atas barang dan/atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Transaksi perdagangan produk dan jasa antara subjek ekonomi dari suatu negara dengan subjek ekonomi dari negara lain disebut perdagangan internasional. Penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ini disebut sebagai subjek ekonomi meliputi individu biasa, perusahaan ekspor dan impor, perusahaan industri, serta perusahaan negara.

Hal ini menunjukkan betapa beragamnya partisipan dalam perdagangan internasional Indonesia yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan kapasitas sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia dan kemajuan teknologi (Halwani, 2005). Perdagangan antar negara ini memiliki peran penting dalam perekonomian dengan melibatkan aktivitas impor dan ekspor. Salah satu elemen kunci dalam perekonomian suatu negara adalah impor barang, yang berdampak signifikan pada ketersediaan komoditas di pasar dan industri domestik. Pengelolaan impor yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam memastikan bahwa impor dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian negara.

Kegiatan impor adalah proses pemasukan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah suatu negara dengan tujuan untuk diperdagangkan yang dapat digunakan untuk produksi atau untuk konsumsi langsung. Impor

dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas bea cukai negara tersebut. Dalam kegiatan impor, barang atau jasa yang didatangkan dari luar wilayah Indonesia harus melalui proses pengawasan oleh pihak Bea Cukai untuk memastikan bahwa semua ketentuan seperti tarif pajak, regulasi produk, dan izin impor telah dipenuhi. Setelah melalui pemeriksaan dan pemenuhan kewajiban pajak atau bea masuk, barang tersebut dapat diizinkan untuk masuk ke pasar domestik. Kegiatan impor memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena memungkinkan negara tersebut untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia secara lokal, memperluas pilihan konsumen, serta memperkuat sektor industri dengan bahan baku atau teknologi yang tidak tersedia secara domestik. Namun impor juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian pada bidang industri dalam negeri dan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan negara.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) No. 20/04/32/Th. XXVI tentang Perkembangan Ekspor dan Impor di Jawa Barat pada bulan Februari 2024 menunjukkan komoditas yang diimpor oleh Indonesia yaitu barang konsumsi, bahan baku atau bahan penolong, dan barang modal. Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai impor menurut tujuan penggunaan barang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 1. 1 Nilai Impor Indonesia menurut Tujuan Penggunaan Barang (BEC)

BEC	Uraian	Nilai CIF (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%)
		2023		2024		y-o-y	m-to-m	c-to-c	2024	
		Feb	Jan-Feb	Jan	Feb	Jan-Feb	Feb-Feb	Feb-Jan	Jan-Feb	Jan-Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	
	Barang Konsumsi	61,03	132,39	122,02	136,48	258,50	123,63	11,85	95,26	12,82
112	Makanan & Minuman (Primary), Unt. R. Tangga	0,74	1,92	0,74	0,42	1,15	(43,54)	(43,31)	(39,84)	0,06
122	Makanan & Minuman (Process), Unt. R. Tangga	7,68	14,70	31,34	26,97	58,31	251,03	(13,95)	296,61	2,89
322	Bahan Bakar & Pelumas (Processed)	0,19	0,42	0,11	0,12	0,23	(35,74)	10,12	(44,90)	0,01
510	Mobil Penumpang	17,68	27,92	13,73	43,97	57,70	148,71	220,21	106,64	2,86
522	Alat Angkutan Bukan Untuk Industri	0,20	0,35	0,60	0,66	1,26	226,28	9,77	259,07	0,06
610	Barang Konsumsi Tahan Lama	5,30	12,14	14,21	17,64	31,85	232,87	24,13	162,36	1,58
620	Barang Konsumsi Setengah Tahan Lama	19,23	50,33	37,99	35,11	73,10	82,59	(7,57)	45,23	3,63
630	Barang Konsumsi Tak Tahan Lama	9,90	20,54	9,78	11,47	21,25	15,83	17,24	3,47	1,05
700	Barang Yang Tak Diklasifikasikan	0,11	4,06	13,52	0,12	13,64	17,07	(99,08)	235,69	0,68
	Bahan Baku/Penolong	570,54	1.587,00	782,70	755,02	1.537,73	32,33	(3,54)	(3,10)	76,29
111	Makanan & Minuman (Primary), Unt. Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Makanan & Minuman (Process), Unt. Industri	8,43	10,17	2,85	1,45	4,30	(82,78)	(49,07)	(57,71)	0,21
210	Bahan Untuk Industri (Primary)	25,25	37,19	35,07	26,13	61,20	3,46	(25,51)	64,54	3,04
220	Bahan Untuk Industri (Process)	313,99	803,12	452,14	420,66	872,80	33,97	(6,96)	8,68	43,30
310	Bahan Bakar & Pelumas (Primary)	0,00	158,22	43,68	77,14	120,82	0,00	76,63	(23,64)	5,99
321	Bahan Bakar Motor	47,35	180,23	39,89	62,54	102,43	32,10	56,79	(43,16)	5,08
322	Bahan Bakar & Pelumas (Processed)	1,24	3,14	2,05	2,25	4,29	80,83	9,89	36,88	0,21
420	Suku Cadang & Perlengkapan Barang Modal	137,95	276,59	176,49	140,07	316,56	1,54	(20,63)	14,45	15,71

Fadiyah Zaina, 2024

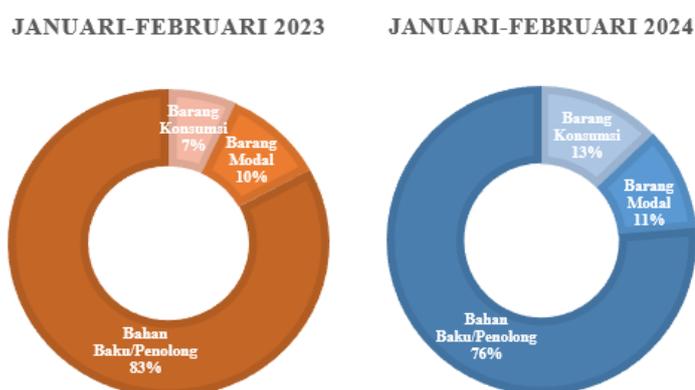
ANALISIS PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP DOKUMEN SUBKONTRAK DALAM PENGELOLAAN IMPOR: STUDI KASUS KPPBC TMP A BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BEC	Uraian	Nilai CIF (Juta USD)					Perubahan (%)			Peran (%) 2024
		2023		2024		y-o-y	m-to-m	c-to-c		
		Feb	Jan-Feb	Jan	Feb	Jan-Feb	Feb-Feb	Feb-Jan	Jan-Feb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	
530	Suku Cadang & Perlengkapan Alat Angkutan	36,32	118,33	30,54	24,77	55,31	(31,79)	(18,87)	(53,26)	2,74
	Barang Modal	91,40	194,61	96,85	122,50	219,36	34,04	26,48	12,71	10,88
410	Barang Modal Kecuali Alat Angkutan	63,06	152,09	80,26	65,96	146,22	4,61	(17,81)	(3,86)	7,25
510	Mobil Penumpang	17,68	27,92	13,73	43,97	57,70	148,71	220,21	106,64	2,86
521	Alat Angkutan Untuk Industri	10,66	14,61	2,87	12,58	15,44	17,95	338,67	5,73	0,77
	Total	722,97	1.914,00	1.001,57	1.014,00	2.015,58	40,26	1,24	5,31	100,00

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 20/04/Th. XXVI, 1 April 2024

Berdasarkan tabel diatas, impor produk konsumsi mengalami lonjakan sebesar 123,63 persen. Selain itu, impor bahan baku dan penolong mencatat peningkatan sebesar 32,33 persen, sedangkan impor barang modal naik sebesar 34,04 persen. Peningkatan impor produk konsumsi menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, sementara kenaikan impor bahan baku dan penolong serta barang modal menunjukkan ekspansi dalam sektor manufaktur dan investasi. Kemudian pada gambar 1.1 menampilkan persentase mengenai Barang Konsumsi dan Barang Modal yang mengalami kenaikan dan Bahan Baku atau Penolong yang mengalami penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh berbagai faktor berikut.



Gambar 1. 1 Struktur nilai impor menurut tujuan penggunaan barang (BEC), Januari-Februari 2023 dan 2024

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 20/04/Th. XXVI, 1 April 2024

Fadiyah Zaina, 2024

ANALISIS PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP DOKUMEN SUBKONTRAK DALAM PENGELOLAAN IMPOR: STUDI KASUS KPPBC TMP A BOGOR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan gambar 1.1, dari Januari hingga Februari 2024 *tren* impor di Jawa Barat menunjukkan perubahan signifikan dalam komposisi barang yang diimpor jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, impor Bahan Baku atau Bahan Penolong mengalami penurunan menjadi 76% persen. Penurunan ini dapat mencerminkan beberapa dinamika dalam sektor industri seperti efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan bahan baku, peningkatan produksi bahan baku lokal, atau adanya pengurangan skala produksi di sektor-sektor tertentu. Bahan Baku atau Bahan Penolong adalah komponen esensial yang digunakan dalam proses produksi, dan penurunan impor jenis barang ini juga berkaitan dengan perubahan strategi perusahaan dalam mengelola persediaan atau pengaruh dari kondisi ekonomi global yang memengaruhi permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh industri di Jawa Barat.

Sementara itu, Barang Konsumsi mengalami lonjakan sebesar 13 persen. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor termasuk peningkatan daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi yang lebih menyukai produk-produk impor, atau adanya peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang meningkatkan permintaan terhadap produk konsumen. Barang Konsumsi mencakup berbagai produk jadi, seperti makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Lonjakan ini juga dapat menandakan adanya pergeseran preferensi konsumen yang lebih mengarah pada produk impor karena dianggap lebih berkualitas atau menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan produk lokal.

Pertumbuhan impor Barang Modal sebesar 11 persen juga mencerminkan pergerakan positif dalam sektor investasi. Barang Modal mencakup alat-alat dan mesin yang digunakan untuk memperluas kapasitas produksi modernisasi fasilitas, atau membuka lini produksi baru. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Barat sedang dalam fase ekspansi, yaitu mempersiapkan diri untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan pasar yang meningkat baik secara domestik maupun internasional. Pertumbuhan ini juga dapat menunjukkan kepercayaan

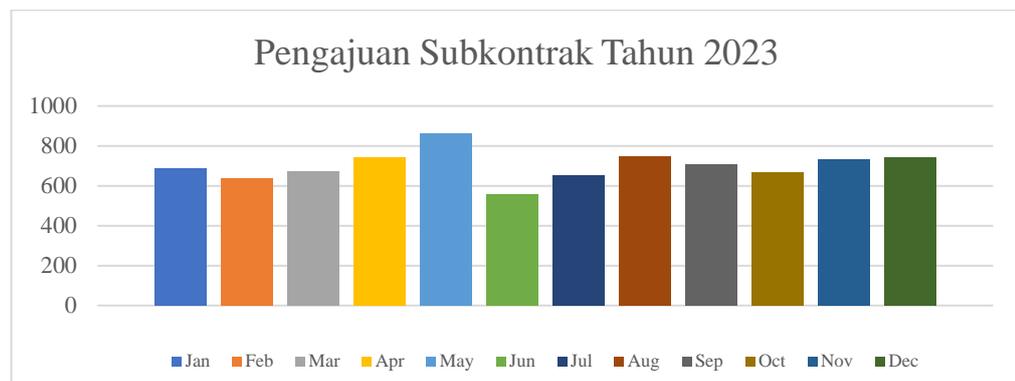
yang meningkat dari investor terhadap prospek ekonomi di Jawa Barat yang menyebabkan para investor menanamkan modal lebih banyak dalam bentuk pembelian barang modal.

Namun, tantangan besar muncul seiring dengan intensitas perdagangan yang semakin meningkat, terutama terkait dengan pengelolaan impor. Ketika volume perdagangan internasional bertambah, maka kompleksitas dalam mengelola rantai pasokan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi operasional menjadi semakin menonjol. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kelancaran aliran barang lintas batas tanpa melanggar keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Pengelolaan impor melibatkan berbagai tahapan dan pihak yang berbeda, mulai dari produsen, eksportir, agen pengiriman, hingga pihak bea cukai dan pemerintah. Setiap tahapan tersebut harus dikelola dengan teliti untuk menghindari keterlambatan, kesalahan dokumen, atau pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi berat.

Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi terbaru menjadi penting untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal dalam perdagangan internasional. Selain itu, kehadiran Bea Cukai sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan impor berjalan lancar yang disesuaikan dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku saat ini. Bea Cukai memiliki peran vital dalam mengawasi masuknya barang impor ke dalam negeri, termasuk ketentuan tarif, pajak, dan aturan lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah praktik ilegal seperti penyelundupan dan penghindaran pajak.

KPPBC TMP A Bogor merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Provinsi Jawa Barat dibawah Kementerian Keuangan yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan industri di wilayah operasionalnya. Salah satu layanan utama yang ditawarkan adalah kegiatan subkontrak. Kegiatan subkontrak ini merupakan pengalihan sebagian pekerjaan atau produksi dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki keahlian khusus atau kapasitas produksi yang lebih besar. Dalam hal ini,

KPPBC TMP A Bogor berperan penting dalam memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif terpenuhi sehingga kegiatan subkontrak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan data pengajuan subkontrak pada tahun 2023.



Gambar 1. 2 Diagram *chart* pengajuan subkontrak tahun 2023

Sumber: KPPBC TMP A Bogor, diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan subkontrak pada tahun 2023 mencapai 8.411 pengajuan. Lalu bulan yang paling banyak mengajukan subkontrak yaitu di bulan Mei sebanyak 863 pengajuan.

Namun pada saat kegiatan subkontrak sedang berjalan, terdapat berbagai kendala yang muncul seperti adanya kesalahan *input* data pada saat perusahaan mengajukan subkontrak dan adanya keterlambatan pada saat memasukkan barang dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, peneliti melakukan observasi dengan judul “Analisis Pengawasan Bea Cukai Terhadap Dokumen Subkontrak Dalam Pengelolaan Impor: Studi Kasus KPPBC TMP A Bogor” guna menganalisis akibat dari kendala yang terjadi dan mengetahui langkah-langkah KPPBC TMP A Bogor dalam mengatasi kendala pada kegiatan subkontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor serta meningkatkan peran dokumen subkontrak.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai acuan untuk penelitian ini adalah jurnal nasional yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan Jaminan Pada Wilayah

Kerja KPPBC TMP A Bandung” yang ditulis oleh Satria Adhitama tahun 2019. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pada wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung, prosedur pengawasan subkontrak untuk komoditi impor di Kawasan Berikat ke TLDDP telah berjalan efektif. Namun terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses pengawasan, seperti perbedaan tujuan fasilitas subkontrak dengan dokumen pengajuan, waktu perizinan fasilitas subkontrak yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, serta jumlah dan lokasi CCTV yang tidak sesuai, dan terjadi gangguan pada portal CEISA 4.0. Peneliti mengambil referensi tersebut sebagai acuan terhadap teori-teori yang mendukung penelitian “Analisis Pengawasan Bea Cukai Terhadap Dokumen Subkontrak Dalam Pengelolaan Impor: Studi Kasus KPPBC TMP A Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alur pengajuan subkontrak yang ada di KPPBC TMP A Bogor?
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bogor dalam mengatasi kendala pada kegiatan subkontrak?
3. Apa rekomendasi perbaikan untuk kendala yang terjadi selama kegiatan subkontrak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis alur pengajuan subkontrak yang ada di KPPBC TMP A Bogor.
2. Menganalisis tindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Bogor dalam mengatasi kendala pada kegiatan subkontrak.
3. Merekomendasikan perbaikan untuk kendala yang terjadi selama kegiatan subkontrak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Bagi KPPBC TMP A Bogor

Dapat meningkatkan efektivitas pengawasan impor dan membantu perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan.

3. Manfaat Bagi Perusahaan Terkait

Dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi bea cukai.

4. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menjadi referensi penulis saat melakukan pemeriksaan pada dokumen bea cukai terkhusus dokumen subkontrak.